



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR .... TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Prioritas dan Plafon anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan antara Bupati Badung dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 903/3492/SETDA/BPKAD pada tanggal 30 Agustus 2021.

903 / 964 / DPRD

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG  
dan  
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah  
Rp. 3.800.966.247.293,00 berkurang sejumlah Rp. 546.827.240.201,00 sehingga menjadi  
Rp. 3.254.139.007.092,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp. 3.800.966.247.293,00
2. Berkurang	Rp. <u>(854.988.448.984,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.945.977.798.309,00

## b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp. 3.800.966.247.293,00	
2. Berkurang	<u>Rp. (546.827.240.201,00)</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 3.254.139.007.092,00
Defisit setelah perubahan		Rp. (308.161.208.783,00)

## c. Pembiayaan

## 1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 00,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 308.161.208.783,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 308.161.208.783,00

## 2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 00,00	
b) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 00,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 00,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 308.161.208.783,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 00,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 2.815.021.011.882,00

2. Berkurang Rp. (842.917.957.561,00)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 1.972.103.054.321,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula Rp. 905.661.635.411,00

2. Berkurang Rp. (16.820.401.423,00)

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 888.841.233.988,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 80.283.600.000,00

2. Bertambah Rp. 4.749.910.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah  
setelah perubahan Rp. 85.033.510.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 2.309.324.004.842,00

2. Berkurang Rp. (758.197.631.472,00)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 1.551.126.373.370,00



## b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	116.266.604.226,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(83.467.929.226,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 32.798.675.000,00

## c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	167.247.347.822,00
2. Bertambah	Rp.	<u>39.820.884.333,00</u>
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 207.068.232.154,00

## d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	222.183.054.992,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(41.073.281.195,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 181.109.773.797,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

## a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp.	755.107.978.000,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(27.974.767.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan		Rp. 727.133.211.000,00

## b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp.	150.553.657.411,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>11.154.365.577,00</u>	
Jumlah Pendetapan Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp.		161.708.022.988,00

(4) Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan :

1. Semula	Rp.	80.283.600.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>4.749.910.000,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp.		85.033.510.000,00

## Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

## a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp.	3.203.993.413.299,00	
2. Berkurang	Rp.	<u>(684.658.175.223,00)</u>	
Jumlah belanja Operasi setelah perubahan	Rp.		2.519.335.238.076,00

## b. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	140.088.120.915,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>20.184.431.996,00</u>	
Jumlah belanja Modal setelah perubahan	Rp.		160.272.552.911,00

## c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	49.590.433.860,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>261.332.363.806,00</u>
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	310.922.797.666,00

## d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp.	407.294.279.219,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(143.685.860.780,00)</u>
Jumlah belanja Transfer setelah perubahan	Rp.	263.608.418.439,00

## (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

## a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp.	1.581.062.478.954,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(380.056.572.031,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	1.201.005.906.923,00

## b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	1.316.981.256.795,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(181.347.067.075,00)</u>
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	1.135.634.189.720,00

## c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	160.000.000,00	
2. Berkurang	Rp.	<u>(72.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan			Rp. 88.000.000,00

## d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	246.992.214.177,00	
2. Berkurang	Rp.	<u>(91.619.072.744,00)</u>	
Jumlah belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 155.373.141.433,00

## e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	58.797.463.373,00	
2. Berkurang	Rp.	<u>(31.563.463.373,00)</u>	
Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp. 27.234.000.000,00

## (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

## a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp.	112.783.811.090,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>495.921.704,00</u>	
Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan			Rp. 113.279.732.794,00

## b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp.	3.695.626.808,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>29.475.185.469,00</u>	
Jumlah belanja Modal Gedung dan Bangunan dan setelah perubahan			Rp. 33.170.812.277,00

## c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula	Rp.	22.415.769.456,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(8.662.411.616,00)</u>

Jumlah belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. 13.753.357.840,00

## d Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp.	1.192.913.561,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(1.185.763.561,00)</u>

Jumlah belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp. 7.150.000,00

## e Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula	Rp.	00,00
2. Bertambah	Rp.	<u>61.500.000,00</u>

Jumlah belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp. 61.500.000,00

## (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis Belanja :

## a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	308.044.443.619,00
2. Bertambah	Rp.	<u>(142.674.451.280,00)</u>

Jumlah belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 165.369.992.339,00

## b Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	99.249.835.600,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>(1.011.409.500,00)</u>
Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	98.238.426.100,00

## Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

## a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	00,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>308.161.208.783,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	308.161.208.783,00

## b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	00,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	00,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :  
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah

a. Semula	Rp.	00,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>308.161.208.783,00</u>
Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp.	308.161.208.783,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :

a. Semula	Rp.	00,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	00,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal .. ..... 2021

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal ... ..... 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR .... TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah didasarkan pada Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Peraturan Daerah ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR ...